



## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi)

Mutiara Octavia <sup>1\*</sup>, Rahmi Syahriza <sup>2</sup>, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [mutiaraoctv29@gmail.com](mailto:mutiaraoctv29@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [rahmisyahriza@uinsu.ac.id](mailto:rahmisyahriza@uinsu.ac.id) <sup>2</sup>,  
[fadhilahahmad@uinsu.ac.id](mailto:fadhilahahmad@uinsu.ac.id) <sup>3</sup>

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,  
Sumatera Utara 20371

Korespondensi email: [mutiaraoctv29@gmail.com](mailto:mutiaraoctv29@gmail.com)

**ABSTRACT:** This research aims to analyze the financial performance of the regional government of Tebing Tinggi City using the degree of fiscal decentralization ratio, regional financial independence ratio, regional financial dependency ratio, PAD effectiveness ratio, regional financial efficiency ratio, harmony ratio and growth ratio. This research uses a descriptive qualitative approach method. Data collection techniques include interviews and documentation obtained from budget realization reports. Based on the results of the financial ratio analysis, it shows that the degree of fiscal decentralization ratio is categorized as deficient with a range of 11.98%-15.89%. The regional financial independence ratio is classified as very low with a range of 14.32%-19.55% with an instructive relationship pattern. The regional financial dependency ratio is categorized as very high with a range of 78.91%-83.64%, where the percentage is more than 50%. The PAD effectiveness ratio is categorized as less effective in 2019, 2020 and 2022 with a range of 80.75%-88.35%. However, in 2018 it was categorized as very effective because it was more than 100%, namely 108.02%. Meanwhile, in 2021 it is categorized as ineffective because it is less than 75%, namely 70.05%. The regional financial efficiency ratio is categorized as less efficient in 2019-2021 with a range of 96.61%-99.10%. However, in 2018 and 2022 it is categorized as inefficient because it is more than 100%, namely 103.92% and 102.61%. The harmony ratio shows that the City of Tebing Tinggi prioritizes its funds towards operating expenditure with an average operating expenditure of 76.05% and a capital expenditure ratio of 23.45%. The growth ratio of PAD, regional income, operating expenditure and capital expenditure experienced positive and negative growth in the 5 budget years.

**Keywords:** Financial Performance, Financial Ratios, Regional Financial Independence Ratio

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan tersebut menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal dikategorikan kurang dengan *range* sebesar 11,98%-15,89%. Rasio kemandirian keuangan daerah tergolong sangat rendah dengan *range* 14,32%-19,55% dengan pola hubungan instruktif. Rasio ketergantungan keuangan daerah dikategorikan sangat tinggi dengan *range* 78,91%-83,64% dimana persentasenya lebih dari 50%. Rasio efektivitas PAD dikategorikan kurang efektif pada tahun 2019, 2020 dan 2022 dengan *range* 80,75%-88,35%. Namun, pada tahun 2018 dikategorikan sangat efektif karena lebih dari 100% yaitu sebesar 108,02%. Sedangkan, pada tahun 2021 dikategorikan tidak efektif karena kurang dari 75% yaitu sebesar 70,05%. Rasio efisiensi keuangan daerah dikategorikan kurang efisien pada tahun 2019-2021 dengan *range* 96,61%-99,10%. Namun, pada tahun 2018 dan 2022 dikategorikan tidak efisien karena lebih dari 100% yaitu sebesar 103,92% dan 102,61%. Rasio keserasian menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi lebih memprioritaskan dananya terhadap belanja operasi dengan rata-rata belanja operasi sebesar 76,05% dan rasio belanja modal sebesar 23,45%. Rasio pertumbuhan PAD, pendapatan daerah, belanja operasi dan belanja modal mengalami pertumbuhan positif dan negatif dalam 5 tahun anggaran.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

## **1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya otonomi daerah, memicu aspirasi pemerintah daerah untuk bertransformasi menjadi entitas yang mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih berkualitas, selaras dengan ekspektasi masyarakatnya, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Menurut ayat (6) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonom guna mengendalikan serta mengupayakan kepentingan negara serta rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Keadaan ini menunjukkan betapa esensialnya kedudukan pemerintah daerah dalam menjamin kemandirian keuangan daerah yang merupakan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan skema pembangunan sentralistik yang dianggap oleh beberapa kalangan sebagai faktor yang memperlambat pembangunan daerah dan memperbesar ketimpangan antar daerah, diharapkan otonomi daerah akan menjadi cara yang paling efisien untuk mendorong pembangunan daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (Afandi & Sianipar, 2016).

Salah satu faktor kunci keberhasilan penerapan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai operasionalnya sendiri dengan sedikit ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal ini dicapai melalui perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan bisa memberikan partisipasi terbesar terhadap kegiatan pemerintah (Kamaroellah, 2017). Dalam pelaksanaannya, dibandingkan dengan dana yang diterima dari pusat, pemerintah daerah harus lebih mandiri secara finansial. Meski demikian, tingginya independensi pemerintah daerah tidak berarti bahwa daerah tidak perlu lagi mendapat dukungan finansial dari pusat, seperti dana perimbangan. Dana perimbangan masih dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan dan memberikan bagi kemajuan daerah.

Kinerja keuangan ialah deskripsi mengenai situasi keuangan suatu organisasi serta pencapaian pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan apakah sudah mencapai target, tujuan dan berjalan lancar atau tidak. Pengukuran kinerja adalah suatu proses dalam menilai kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditentukan (Mokodompit et al., 2014). Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pemanfaatan indikator keuangan yang relevan. Dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan, pemerintah akan sangat terbantu dalam memaksimalkan kinerja mereka sehingga bisa mencapai target, visi serta misi yang sudah diputuskan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi adalah badan daerah yang mengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja

serta Rincian Tugas Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi pasal 2 ayat (2) yaitu BPKPD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dilihat dari laporan realisasi anggaran, pendapatan daerah mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,62%. Keadaan ini menurun dikarenakan penurunan lain-lain PAD yang sah sebesar 23,50%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar 7,52%. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya PAD seperti retribusi daerah, pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan pendapatan pemerintah pusat pada masa pandemi *covid-19*. Selanjutnya terjadi kenaikan sebesar 4,96% di tahun 2021 yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat dikarenakan oleh kembalinya mereka beraktivitas di masa pandemi *covid-19*. Kemudian terjadi penurunan kembali di tahun 2022 dari tahun 2021 sebesar 4,16%, hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat yang masih terdampak pada masa *covid-19* dan tingginya angka inflasi.

**Tabel 1.** Data Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)
2018	114.048.354.142,71	583.446.860.396	20.289.061.558	717.784.276.096,71
2019	105.239.918.351,52	588.509.037.206	19.564.340.830	713.313.296.387,52
2020	90.981.301.747,13	542.966.297.134	25.687.455.212	659.635.054.093,13
2021	82.930.324.048,00	579.081.192.667	30.327.150.000	692.338.666.715
2022	88.747.190.213,25	541.876.466.636	32.882.531.394	663.506.188.243,25

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022

Tabel 1.1 menyajikan penurunan pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi selama periode 2018 hingga 2020. Pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase pendapatan daerah sebesar 0,62%. Pada tahun 2020 dengan penurunan yang lebih signifikan sebesar 7,52%. Namun, pada tahun 2021, tren negatif tersebut berbalik arah dengan kenaikan pendapatan daerah sebesar 4,96%. Sayangnya, tren positif ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar 4,16%.

Selain itu, terjadi penurunan belanja daerah di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 dan 2020. Menurunnya belanja daerah sebesar 7,37% dikarenakan turunnya penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2019. Pandemi *covid-19* menjadi penyebab utama menurunnya pendapatan wilayah Tebing Tinggi pada tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan belanja daerah sebesar 5,39%. Dibandingkan tahun 2020, terjadi peningkatan

sebesar 2,32%. Pada tahun 2021, terutama didorong oleh semakin membaiknya perekonomian Kota Tebing Tinggi sehingga mempengaruhi belanja daerah. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali sebesar 1,79% dikarenakan meningkatnya perekonomian di Kota Tebing Tinggi. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi inflasi. Kemudian, belanja modal pada tahun 2018-2022 secara berturut-turut sebesar 27,25%, 22,22%, 22,91%, 25,36%, 19,46% digunakan untuk menambah aset Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Pemerintah Kota Tebing Tinggi memprioritaskan alokasi anggaran bagi belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Keadaan ini didasari oleh kontribusi belanja operasi yang lebih tinggi terhadap total belanja daerah dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini didukung oleh data tabel 2. mengenai belanja daerah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

**Tabel 2.** Data Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)
2018	542.398.350.143,62	203.340.069.232,71	210.070.200	745.948.489.576,33
2019	537.360.723.674,71	153.577.322.071,69	-	690.938.045.746,40
2020	488.688.236.886,24	149.776.465.844,42	15.256.081.445	653.720.784.175,66
2021	498.357.709.828,21	169.669.665.003,19	856.767.010	668.884.141.841,40
2022	547.944.759.101,69	132.550.214.696,21	338.726.719	680.833.700.516,90

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase belanja daerah sebesar 7,37%. Pada tahun 2020, terjadi penurunan kembali sebesar 5,39%. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 2,32%. Terakhir, tahun 2022 mengalami pembalikan hampir 1,79%.

Berdasarkan data pendapatan dan belanja daerah Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2018–2022 terdapat kinerja keuangan yang tidak baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah PAD yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer akibat turunnya PAD. Selanjutnya, turunnya total pendapatan daerah pada tahun 2019, 2020 dan 2022. Selain itu, alokasi belanja APBD yang tidak seimbang disebabkan sebagian besar digunakan untuk belanja operasi sehingga menghambat optimalisasi implementasi kebijakan prioritas belanja modal. Pada tahun 2018 dan 2022, pemerintah Kota Tebing Tinggi juga mengeluarkan lebih banyak biaya dalam memperoleh pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing

## **Tinggi (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi)”.**

### **2. KAJIAN TEORITIS**

#### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah pengumpulan, kategorisasi, pemeriksaan serta pembuatan laporan keuangan bagi entitas public (Hantono, 2021). Instansi pemerintah memerlukan dana dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) untuk melakukan kegiatan pelayanan tersebut. Penerimaan bukan pajak (dari sumber daya alam, keuntungan BUMN bagian pemerintah, dan lain-lain) serta penerimaan hibah berasal dari penerimaan pajak (pajak perdagangan dalam dan luar negeri). Pendapatannya berasal dari masyarakat, sehingga pemerintah harus mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan komponen kunci dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di sektor pemerintahan. Fokus akuntansi sektor publik pada negara dan pemerintah pusat merupakan dampak dari terbentuknya pemerintahan negara Indonesia. Kekuasaan mengatur pengelolaan keuangan negara merupakan landasan mendasar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penerapan prinsip ini dinilai akan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan negara, karena pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan APBN dan APBD setiap tahunnya untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan (Hasanah & Fauzi, 2017).

#### **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah berarti efektivitas dan kecakapan suatu wilayah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya keuangan asli daerahnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Searah dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi manfaat bagi masyarakat daerah karena mereka tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat (Dali et al., 2021). Keberhasilan kinerja keuangan sangat bergantung pada seberapa baik suatu organisasi dalam mengelola keuangan atau dananya (Siagian et al., 2023).

Pemerintah daerah mensosialisasikan keuangan daerah kepada para pemerintah dan publik dengan cara pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, salah satu metode yang amat krusial untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang sudah selesai dan dikerjakan (Halim & Kusufi, 2012). Berikut adalah jenis-jenis rasio keuangan

yang dimanfaatkan pemerintah daerah dalam mengukur kinerja keuangan mereka, diantaranya:

**a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal diungkapkan oleh rasio (tanggung jawab dan otoritas) yang dikirim oleh pemerintah pusat kepada pemda dalam mengelola keuangan dan mendukung proyek-proyek pembangunan di daerah (Siregar & Mariana, 2020). Membandingkan jumlah PAD dengan total pendapatan daerah merupakan salah satu cara untuk memahami rasio derajat keuangan desentralisasi. Kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi semakin meningkat seiring dengan peningkatan keterlibatan PAD (Mahmudi, 2011).

**b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio ini mencerminkan kesanggupan pemda dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan, membangun serta melayani publik secara mandiri, terutama dengan memanfaatkan pendapatan yang bersumber dari pajak serta retribusi daerah. Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kemandirian ini adalah dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan daerah yang meliputi bantuan dari pihak eksternal (Halim & Kusufi, 2012)

**c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Salah satu metrik terpenting untuk menilai tingkat stabilitas keuangan di suatu lokasi adalah rasio ketergantungan daerah. Perhitungan statistik ini dilakukan dengan membandingkan pendapatan transfer yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2011).

**d. Rasio Efektivitas PAD**

Rasio ini ialah sebuah metrik penting untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah pusat menjalankan tugasnya dalam mencapai tujuan pendapatan asli daerah (PAD). Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD yang dapat dicapai dibandingkan dengan PAD yang diharapkan sebelumnya (Halim & Kusufi, 2012).

**e. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio ini menunjukkan hubungan antara biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan sebenarnya yang diperoleh. Jika rasionya kurang dari 1 atau 100%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pengumpulan pendapatan dianggap efisien. Semakin kecil rasionya, maka semakin baik kinerjanya. Oleh karena itu, untuk menentukan efisiensi upaya pengumpulan pendapatan, pemerintah daerah harus secara tepat menghitung biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan mereka peroleh (Halim & Kusufi, 2012).

**f. Rasio Kekeragaman**

Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan dana terhadap belanja operasi serta belanja modal. Apabila persentase dana yang dianggarkan akan belanja operasi meningkat, maka dana yang dianggarkan akan belanja modal, seperti infrastruktur, cenderung menurun. Dengan demikian, rasio keserasian membantu dalam memantau bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya ekonomi dan memprioritaskan penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Halim & Kusufi, 2012).

**g. Rasio Pertumbuhan**

Rasio ini mewakili sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya di setiap periodenya. Dengan memahami pola pertumbuhan pendapatan serta pengeluaran, pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan mana dari peluang-peluang yang harus dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, rasio pertumbuhan membantu dalam memantau kesanggupan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan serta pertahanannya terhadap kinerja keuangan yang stabil dan berkembang (Halim & Kusufi, 2012). Rasio pertumbuhan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi apakah kinerja anggaran menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja yang signifikan secara positif atau negatif selama tahun anggaran. Dengan demikian, rasio pertumbuhan membantu dalam memantau kinerja keuangan pemerintah daerah dan menentukan apakah anggaran telah mencapai tujuan yang ditetapkan (Mahmudi, 2010).

### **3. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian yang memperjelas masalah penelitian disebut penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian dengan memberikan deskripsi dan penjelasan tentang fenomena yang diteliti (Priadana & Sunarsi, 2021). Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan data kuantitatif. Penelitian yang tidak hanya mengandalkan metode statistik untuk mencapai tujuannya dikenal dengan penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini, biasanya menerapkan metode analisis yang sering kali memunculkan perspektif subjek, proses, dan sejauh mana teori tersebut digunakan sebagai sarana untuk memastikan kesesuaian dengan hasil yang diinginkan (Fiantika et al., 2022).

Dalam penelitian ini, objek penelitian ialah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2022. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi yang beralamat di jalan Dr. Sutomo No.14, Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20616. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif deskriptif yakni mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan dari dokumentasi, kemudian dianalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun 2018-2022. Rasio-rasio keuangan tersebut antara lain: rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil analisis rasio keuangan yang digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2018-2022 antara lain:

##### a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{RDDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3.** Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	RDDF (%)	Kemampuan Keuangan
2018	114.048.354.142,71	717.784.276.096,71	15,89	Kurang
2019	105.239.918.351,52	713.313.296.387,52	14,75	Kurang
2020	90.981.301.747,13	659.635.054.093,13	13,79	Kurang
2021	82.930.324.048,00	692.338.666.715,00	11,98	Kurang
2022	88.747.190.213,25	663.506.188.243,25	13,38	Kurang
Rata-rata			13,96	Kurang

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)*

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.1, kinerja keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi tergolong kurang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal. Pada tahun 2018, persentase terbesar terhadap total pendapatan daerah sebesar 15,89%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 14,75%. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 13,79%. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 11,98%. Terakhir, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,38%. Standar rasio derajat desentralisasi fiskal yang bersumber dari (Ambya, 2023) menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kota Tebing Tinggi apabila ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal masih tergolong kurang sebab berada pada interval 10,01-20,00%.

### b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

**Tabel 4.** Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2018	114.048.354.142,71	583.446.860.396,00	19,55	Instruktif
2019	105.239.918.351,52	588.509.037.206,00	17,88	Instruktif
2020	90.981.301.747,13	542.966.297.134,00	16,76	Instruktif
2021	82.930.324.048,00	579.081.192.667,00	14,32	Instruktif
2022	88.747.190.213,25	541.876.466.636,00	16,38	Instruktif
Rata-rata			16,98	Instruktif

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)*

Berdasarkan hasil perhitungan data pada tabel 4.2, penulis mengategorikan kinerja keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi sangat rendah ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan adanya paradigma hubungan instruktif, yang mana pemerintah pusat mempunyai peran yang terbesar jika dibanding pemerintah daerah. Pada tahun 2018 dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 19,55%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebanyak 17,88%. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebanyak 16,76%. Kemudian, pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan sebanyak 14,32%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 16,38%. Standar rasio kemandirian keuangan daerah yang bersumber dari (Halim, 2007) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Tebing Tinggi berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah bisa digolongkan sangat rendah dengan pola hubungan instruktif karena berada di interval 0-25%.

### c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 5.** Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan (%)	Keterangan
2018	566.404.498.966,00	717.784.276.096,71	78,91	Sangat Tinggi
2019	588.509.037.206,00	713.313.296.387,52	82,50	Sangat Tinggi
2020	542.966.297.134,00	659.635.054.093,13	82,31	Sangat Tinggi
2021	579.081.192.667,00	692.338.666.715,00	83,64	Sangat Tinggi
2022	541.876.466.636,00	663.506.188.243,25	81,67	Sangat Tinggi
Rata-rata			81,81	Sangat Tinggi

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)*

Berdasarkan tabel 4.3, kinerja keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi tergolong sangat tinggi ditinjau dari rasio ketergantungan keuangan daerah. Pada tahun 2018 adalah persentase paling rendah sebesar 78,91%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 82,50%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 82,31%. Kemudian, tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 83,64%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 81,67%. Standar rasio ketergantungan keuangan daerah yang bersumber dari (Ambya, 2023) menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi masih sangat tinggi yaitu melebihi 50%.

### d. Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 6.** Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2018	114.048.354.142,71	105.579.950.493,00	108,02	Sangat Efektif
2019	105.239.918.351,52	119.116.990.780,10	88,35	Kurang Efektif
2020	90.981.301.747,13	110.798.461.164,00	82,11	Kurang Efektif
2021	82.930.324.048,00	118.392.343.818,00	70,05	Tidak Efektif
2022	88.747.190.213,25	109.904.586.000,00	80,75	Kurang Efektif
Rata-rata			85,86	Kurang Efektif

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)*

Berdasarkan perhitungan yang disajikan pada tabel 4.4, kinerja keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat dinilai berdasarkan rasio efektivitas PAD tahun 2018 yang

mencapai persentase tertinggi sebesar 108,02%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 88,35% dan pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan sebesar 82,11%. Kemudian, pada tahun 2021 dengan terendah sebesar 70,05%. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 80,75%. Standar rasio efektivitas yang bersumber dari (Mahmudi, 2011) menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 tergolong sangat efektif karena melebihi 100%. Dianggap kurang efektif pada tahun 2019, 2020, dan 2022 karena persentasenya berada pada interval 75-89%. Kemudian, pada tahun 2021 tergolong tidak efektif karena nilainya kurang dari 75%.

#### e. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 7.** Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	REKD (%)	Keterangan
2018	745.948.489.576,33	717.784.276.096,71	103,92	Tidak Efisien
2019	690.938.045.746,40	713.313.296.387,52	96,86	Kurang Efisien
2020	653.720.784.175,66	659.635.054.093,13	99,10	Kurang Efisien
2021	668.884.141.841,40	692.338.666.715,00	96,61	Kurang Efisien
2022	680.833.700.516,90	663.506.188.243,25	102,61	Tidak Efisien
Rata-rata			99,82	Kurang Efisien

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)*

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 yang ditinjau dari rasio efisiensi keuangan daerah merupakan persentase tertinggi yaitu sebesar 103,92%. Persentasenya pada tahun 2019 sebanyak 96,86%. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebanyak 99,10%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 96,61%. Terakhir, pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebanyak 102,61%. Standar rasio efisiensi keuangan daerah yang bersumber dari (Halim, 2007) bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak efisien. Hal ini didasarkan pada rasio yang melebihi 100% baik pada tahun 2018 maupun 2022. Pada tahun 2019 sampai 2022 dikategorikan kurang efisien karena persentasenya pada interval 90-100%.

#### f. Rasio Keserasian

Rasio keserasian belanja operasi dan belanja modal dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 8.** Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2018	542.398.350.143,62	745.948.489.576,33	72,71
2019	537.360.723.674,71	690.938.045.746,40	77,77
2020	488.688.236.886,24	653.720.784.175,66	74,75
2021	498.357.709.828,21	668.884.141.841,40	74,50
2022	547.944.759.101,69	680.833.700.516,90	80,48
Rata-rata			76,05

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)

Berdasarkan temuan pada tabel 4.6, rata-rata rasio keserasian belanja operasi pemerintah Kota Tebing Tinggi sebesar 76,05%. Persentase terendah yang terjadi pada tahun 2018 sebesar 72,71%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 77,77%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 74,75%. Kemudian, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 74,50%. Terakhir, pada tahun 2022 dengan persentase tertinggi sebesar 80,48%.

**Tabel 9.** Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2018	203.340.069.232,71	745.948.489.576,33	27,26
2019	153.577.322.071,69	690.938.045.746,40	22,22
2020	149.776.465.844,42	653.720.784.175,66	22,91
2021	169.669.665.003,19	668.884.141.841,40	25,37
2022	132.550.214.696,21	680.833.700.516,90	19,47
Rata-rata			23,45

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.7, Pemerintah Kota Tebing Tinggi memiliki rasio keserasian belanja modal sebesar 27,26% pada tahun 2018 yang merupakan persentase tertinggi. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 22,22%. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 22,91%. Pada tahun 2021 kembali terjadi kenaikan sebesar 25,37%. Terakhir, pada tahun 2022 persentasenya mencapai titik terendah hanya 19,47%. Keadaan ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebaiknya meningkatkan rasio belanja modal karena saat ini lebih rendah dibandingkan rasio belanja operasi. Rata-rata rasio keserasian belanja operasi sebanyak 76,05%, sedangkan rata-rata rasio keserasian belanja modal sebanyak 23,45%.

**g. Rasio Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan pendapatan daerah, PAD, belanja operasi dan belanja modal dapat dihitung dengan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

$P_n$  = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Operasi/Belanja Modal yang dihitung pada tahun ke-n

$P_0$  = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Operasi/Belanja Modal yang dihitung pada tahun sebelum n.

**Tabel 10.** Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun 2018-2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	114.048.354.142, 71	105.239.918.351, 52	90.981.301.747, 13	82.930.324.048, 00	88.747.190.213, 25
Pertumbuhan PAD	-	<b>-7,72%</b>	<b>-13,55%</b>	<b>-8,85%</b>	<b>7,01%</b>
Pendapatan Daerah	717.784.276.096, 71	713.313.296.387, 52	659.635.054.093, 13	692.338.666.715, 00	663.506.188.243, 25
Pertumbuhan Pendapatan Daerah	-	<b>-0,62%</b>	<b>-7,52%</b>	<b>4,96%</b>	<b>-4,16%</b>
Belanja Operasi	542.398.350.143, 62	537.360.723.674, 71	488.688.236.886, 24	498.357.709.828, 21	547.944.759.101, 69
Pertumbuhan Belanja Operasi	-	<b>-0,93%</b>	<b>-9,06%</b>	<b>1,98%</b>	<b>9,95%</b>
Belanja Modal	203.340.069.232, 71	153.577.322.071, 69	149.776.465.844, 42	169.669.665.003, 19	132.550.214.696, 21
Pertumbuhan Belanja Modal	-	<b>-24,47%</b>	<b>-2,47%</b>	<b>13,28%</b>	<b>-21,88%</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019-2021 secara berturut-turut sebesar -7,72%, -13,55%, dan -8,85%. Pada tahun 2022, PAD mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,01%. Pendapatan daerah mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 dengan tingkat

pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -0,62% dan -7,52%. Pada tahun 2021, pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,96%. Pada tahun 2022, pendapatan daerah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,16%. Belanja operasi mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing turun sebesar -0,93% dan -9,06%. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,98% dan 9,95%. Belanja modal mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019 dan 2020 sebesar -24,47% dan -2,47%. Pada tahun 2021, belanja modal mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,28%. Pada tahun 2022, belanja modal mengalami pertumbuhan negatif sebesar -21,88%.

Hasil rasio pertumbuhan di atas adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih mengalami pertumbuhan positif dan negatif setiap tahunnya diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti keadaan ekonomi yang bervariasi, kebijakan fiskal, perubahan dalam tingkat pengeluaran pemerintah, perbedaan dalam pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan proyek infrastruktur dan kebutuhan mendesak dalam layanan publik. Sehubungan dengan teori (Yuesti et al., 2020) bahwa organisasi harus mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan:

- a. Rasio derajat desentralisasi fiskal tergolong kurang sebab terletak pada rentang 10,01-20,00%.
- b. Rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan sangat rendah dengan pola hubungan instruktif sebab berada pada rentang 0-25%.
- c. Rasio ketergantungan keuangan daerah dikategorikan sangat tinggi sebab persentase lebih dari 50%.
- d. Rasio efektivitas PAD pada tahun 2018 dikategorikan sangat efektif sebab persentase di atas 100%. Sedangkan, pada tahun 2019-2022 dikategorikan kurang efektif yaitu pada interval 75-89%. Kecuali pada tahun 2020 dikategorikan tidak efektif sebab persentase kurang dari 75%.
- e. Rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2018 dan 2022 dikategorikan tidak efisien karena persentase lebih 100%. Sedangkan, pada tahun 2019-2021 dikategorikan kurang efisien sebab terletak pada rentang 90-100%.
- f. Rasio keserasian lebih mengutamakan dananya terhadap belanja operasi dibandingkan belanja modal.

- g. Rasio pertumbuhan PAD, total pendapatan daerah, belanja operasi dan belanja modal mengalami pertumbuhan positif dan negatif.

Berdasarkan temuan penelitian serta kesimpulan, berikut beberapa saran yang bisa bermanfaat dalam peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi:

- a. Pemerintah Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan menggali potensi-potensi yang menambah jumlah PAD sehingga tercapainya kemandirian keuangan dan ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah provinsi atau pusat dapat berkurang, lebih meminimalisir belanja daerahnya dalam memperoleh pendapatan daerah supaya terciptanya efisiensi keuangan daerah, lebih optimal dalam mengalokasikan dananya terhadap belanja operasi serta belanja modal dengan mengurangi besaran belanja operasi serta menambah besaran belanja modal.
- b. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan bisa melaksanakan riset dengan memperbanyak kota/kabupaten yang ada di Sumatera Utara, menambah periode menjadi lebih dari 5 tahun serta menambah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk penilaian kinerja keuangan daerah, oleh karenanya hasil penelitian yang didapatkan bisa memperoleh pemahaman lebih mendalam dan luas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, M. N., & Sianipar, R. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Wacana Kinerja*, 19, 2.
- Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Dali, N., Akib, M., & Haisa, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 6(1), 326.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hantono. (2021). Kapita Selekta Akuntansi Sektor Publik. In S. Bahri (Ed.), *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: Penerbit In Media.



- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 126.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mokodompit, P. S., Pangemana, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. 2(2), 1522.
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Tangerang: Pascal Books.
- Siagian, Y. A., Nawawi, Z. M., & Syafina, L. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Metode Economic Value Added (EVA). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 68.
- Siregar, A. O. D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE : Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 8–9.
- Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik* (N. W. Rustiarini (ed.)). Bandung: CV. Noah Alethia.